

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agensi Teori*)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada sektor publik, *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. *Agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak *agent* secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan *prinsipal*, namun di sisi lain *agent* juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Girsang, 2015).

Menurut Meisser yang dikutip dari Girsang (2015), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Mardiasmo (Girsang, 2015) menyatakan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan sewajar mungkin.

Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan *monitoring* oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Dalam konsep pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan (Girsang, 2015).

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip akuntansi yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah akan mendapatkan manfaat dalam hal konektivitas dan integritas laporan keuangan melalui dukungan IT (*information technology*) yang handal sehingga menciptakan sistem tata kelola yang baik.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke-tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan., perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Kualitas laporan keuangan sangat berkaitan erat dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan pernyataan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan akan diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2013). Keempat indikator merupakan karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.3 Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Robert & Vijay yang dikutip dari Nurlaila (2014), dikatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu piasat tanggung jawab dengan tujuannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuh memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka

laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka konseptual disebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai yang dipraktikkan oleh Instansinya. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan efektif (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau rendah (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan) dikutip dari Nurlaila (2014):

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Keberhasilan penerapan Basis Akuntansi Diukur dengan dua Indikator yaitu basis akrual dan basis kas. Dalam pengukuran basis akrual dan basis kas digunakan masing-masing tiga pertanyaan.

2. Nilai Historis

Nilai historis merupakan harga pada saat aktiva atau kewajiban diperoleh. Keberhasilan penerapan prinsip nilai historis diukur dengan dua indikator yaitu penilaian asset dan penilaian kewajiban.

3. Realisasi

Realisasi merupakan hasil yang dicapai dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Keberhasilan penerapan prinsip realisasi diukur dengan indicator konsep layak temu biaya pendapatan.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Keberhasilan penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal diukur dengan dua indikator yaitu penyajian transaksi secara wajar dan penyajian peristiwa lainnya.

5. Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Keberhasilan penerapan Prinsip periodisitas diukur menggunakan indikator periode pelaporan.

6. Konsistensi

Konsistensi berarti perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Keberhasilan penerapan prinsip konsistensi diukur menggunakan indikator penerapan metode akuntansi.

7. Pengungkapan Lengkap

Pengungkapan lengkap berarti Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Keberhasilan penerapan prinsip pengungkapan lengkap diukur menggunakan indikator kelengkapan informasi laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar

Penyajian wajar berarti semua informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan disajikan secara wajar. Keberhasilan penerapan prinsip pengungkapan lengkap diukur menggunakan tujuh indikator yaitu penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen

organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013).

Menurut Zuliarti (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Widodo yang dikutip oleh Kharis (2010), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Oleh karena itu sumber daya manusia dapat diukur melalui tiga poin tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2013) yaitu latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di bidang akuntansi.

1. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan. Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

3. Pengalaman di Bidang Akuntansi

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Surastiani dan Handayani (2015), menyatakan bahwa pemanfaat teknologi informasi adalah pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang.

Menurut McKeown yang dikutip oleh Suyanto (2005), teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Williams dan Sawyer yang dikutip oleh Seesar (2010), bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum

yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyampaikan informasi, sedangkan menurut Ishak (2008), teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009), adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, teknologi informasi harus dimanfaatkan dengan baik. Maka pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini akan diukur dengan beberapa indikator seperti yang dikemukakan oleh Nurillah (2014):

1. Sistem Akuntansi sesuai dengan SAP.
2. Jaringan internet tersedia.
3. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik.
4. Aplikasi yang digunakan.
5. Laporan keuangan terkomputerisasi.
6. *Software* sesuai Undang-Undang.
7. Terdapat antivirus yang memadai.

2.6 Sistem Pengendalian Internal

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian Umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011).

Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan Negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Maka sistem pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur dengan 7 indikator yang di adopsi dari penelitian terdahulu Sukmaningrum (2012), yaitu: (1) Integritas data, (2)

Ketepatan input dan posting data, (3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4) Tersimpannya dokumen sumber data, (5) Pembagian tanggungjawab, (6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, (7) Implementasi kebijakan dan standar.

2.7 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga menjelaskan mengenai peranan serta tujuan dari laporan keuangan pemerintah, dimana setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi.

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, dijelaskan juga pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Ashari (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi (Survey Pada Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta)	Variabel Bebas: Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Terikat: Kualitas Laporan Keuangan Instansi	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi
Humairoh (2013)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember)	Variabel Bebas: Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Terikat: Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Nurlaila (2014)	Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)	Variabel Bebas: Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Variabel Terikat: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),	Variabel Bebas: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem	Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi

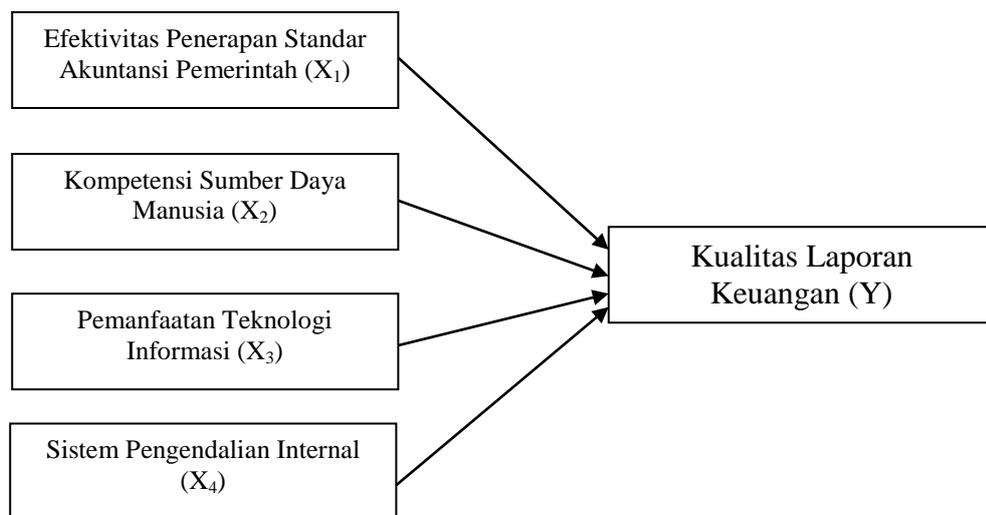
	Pemfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Terikat: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
--	---	--	--

Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)	Variabel Bebas: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Terikat: Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Surastiani dan Handayani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Bebas: Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Terikat: Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		Pemerintah Daerah	
Windiastuti (2013)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung	Variabel Bebas: Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Terikat: Kualitas Laporan Keuangan	Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ningtyas (2015), penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014), menyatakan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016), yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.10.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Havesi, 2005 (dalam Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Menurut Wati, dkk (2014) Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan

.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Humairoh (2013), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2013), juga menyatakan bahwa sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.10.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infomasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Yulianti (2010), teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknoogi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Sapitri, dkk (2015), menyatakan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, informasi keuangan menjadi berkualitas, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat berarti bebas dari suatu kesalahan, tidak bias karena apabila suatu informasi yang bias dapat menyesatkan penerima atau pengguna informasi tersebut. Laporan keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2016), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.10.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mahmudi dalam Herawati (2014) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh nurillah (2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang tinggi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan